



PEKAN PANUTAN PEMBAYARAN PBB 2024

Bayar Pajak Lebih Awal Optimalkan Pembangunan Daerah

YOGYA (KR) - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya kembali memfasilitasi pekan panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pembayaran pajak lebih awal dinilai mampu mengoptimalkan jalannya pembangunan di daerah.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Ir Sugeng Purwanto MMA, mengaku akan terus mendukung program panutan pembayaran PBB. Menurutnya, masih banyak wajib pajak yang membayarkan PBB jelang jatuh tempo atau 30 September jika kewajiban itu mampu ditunaikan lebih awal maka jauh lebih baik. "Dengan membayarkan lebih awal maka dapat mendorong pendapatan awal tahun sehingga pemerintah bisa menjalankan proyek pembangunan secara efektif dan efisien," terangnya di sela pekan panutan pembayaran

PBB 2024 di komplek Balai kota Yogya, Selasa (28/5). Sugeng juga menekankan, PBB merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan pajak itu pun digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan dan belanja daerah. Di samping itu pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak juga merupakan bukti peran aktif dalam pembangunan kewilayahan sehingga turut andil dalam kemajuan negara.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB sudah didistribusikan ke

wajib pajak sejak 7 Februari 2024 lalu. Totalnya terdapat 97.398 objek pajak dengan nilai ketetapan sebesar Rp 145,8 miliar. Dari ketetapan itu Pemkot Yogya menargetkan penerimaan sebesar Rp 120 miliar. Hingga 27 Mei 2024, sudah terealisasi 12,9 persen atau Rp 15 miliar. "Sesuai dengan namanya yakni panutan, acara yang dihadiri oleh kalangan ASN, pejabat, pengusaha serta tokoh masyarakat ini harapannya mampu memberikan keteladanan, menginspirasi dan mendorong partisipasi wajib pajak," tandasnya.

Direktur Utama PT Bank

BPD DIY Santoso Rochmad, mengungkapkan pihaknya membuka ruang seluas-luasnya untuk pembayaran pajak secara nontunai. Salah satunya melalui pekan panutan pembayaran PBB kali ini dengan stimulasi berupa cashback hingga 50 persen sebesar maksimal Rp 20.000 bagi wajib pajak yang membayarkan melalui mobile banking.

"Sebenarnya (cashback) itu hanya gimmik saja. Tetapi yang lebih penting ialah bagaimana kami memfasilitasi Pemkot dalam rangka elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Era tunai saat ini sudah bergeser ke nontunai. Tidak perlu lagi harus antri dan sebagainya. Dari pada waktu terbuang untuk antri, lebih baik digunakan untuk bisnis," ungkapnya.

Fasilitasi dalam rangka

elektronifikasi transaksi pembayaran pajak daerah yang diberikan oleh BPD DIY antara lain berupa QRIS dinamis dan kini diperluas melalui virtual account. Melalui layanan tersebut maka pembayaran pajak bisa dengan mudah menggunakan mobile banking. Khusus dengan virtual account maka pembayaran bisa sampai Rp 250 juta.

Sementara Pj Kepala BPKAD Kota Yogya Wasesa, menjelaskan terdapat sekitar 500 wajib pajak yang sudah menyatakan hadir dalam pekan panutan pembayaran PBB kali ini. Dari jumlah tersebut total ketetapan bisa yang terealisasi mencapai Rp 19 miliar.

"Kami juga sediakan door-prize bagi wajib pajak yang beruntung sebagai bentuk apresiasi. Bagi yang membayar PBB pada momentum



KR-Ardhi Wahdan

Wajib pajak membayarkan PBB disaksikan oleh Pj Walikota Yogya, Dirut PT Bank BPD DIY serta Kepala Perwakilan BDIY.

kali ini juga otomatis mendapat potongan sebesar lima persen dari nilai pokok PBB," ujarnya. (Dhi)-4

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005